

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA SKPD DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI ACEH**

Oleh : Dra.Hj.Nurhayati, MSi, Ak,CA

Dosen Tetap STIES Banda Aceh

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja SKPD pada Dinas Pertambangan dan Energi Aceh. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengusunan anggaran dan pengguna anggaran SKPD di Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Total sampel sebanyak 45 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) secara bersama variabel partisipasi penyusunan anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, (2) Secara parsial partisipasi pengusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD Dinas Pertambangan Energi Aceh.

Kata kunci : Partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja SKPD.

ABSTRACT

**THE IMPACT OF PARTICIPATING IN BUDGET ARRANGING AND GOAL
BUDGET CLARITY TO THE PERFORMANCE OF SKPD MINING AND
ENERGY DEPARTMENT OF ACEH**

By : Dra.Hj.Nurhayati, MSi, Ak, CA

Dosen Tetap STIES Banda Aceh

The purpose of this research is to know the impact of participation in budget

arranging and goal budget clarity to the performance of SKPD Mining and Energy Department of Aceh.

The samples of this research are the employees that were involved in the budget arranging and the budget user of SKPD in the Mining and Energy Department of Aceh. There were 45 respondents in total. The choosing of the samples was done by using the *simple random sampling* method. The analytic method that was used in this research is the *multiple linier regression* method.

The result of this research shows (1) variably participation in budget arranging and goal budget clarity affects the performance of the SKPD in the Mining and Energy Department of Aceh, (2) Partially participation in budget arranging affects significantly on the performance of the SKPD while the goal budget clarity affects the performance of the SKPD in the Mining and Energy Department of Aceh.

Keywords : participation on budget arranging, goal budget clarity and SKPD's

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan

Organisasi sektor publik merupakan entitas ekonomi yang mempunyai keunikan tersendiri, yaitu melakukan transaksi ekonomi dan keuangan, dan memiliki cirri cirri yaitu dikelola tidak untuk mencari keuntungan, dimiliki secara kolektif oleh publik, kepemilikan atas sumber daya tidak dalam bentuk saham, dan didasarkan pada konsensus. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, maka organisasi sektor publik seyogyanya menghasilkan kinerja untuk meningkatkan kesejahteraan publik Noerdiawan, (2006:08).

Kinerja organisasi sektor adalah pencapaian hasil atas pelaksanaan aktivitas secara berkualitas dan bekuantitas sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawab yang diemban. Kriteria suatu organisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan dan tidak melanggar hukum, seerta sesuai dengan moral maupun etika. .Menurut Bastian (2006 : 274) kinerja organisasi publik adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/2011 (pasal 1 ayat 37) menegaskan bahwa kinerja satuan organisasi sektor publik adalah

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang terukur.

Dari penjelesan diatas dapat dipahami bahwa sebuah kinerja suatu organisasi sektor publik yang mengelola dana masyarakat seyogyanya mampu memberikan kinerja yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan publik.

Hal inipun berlaku pula pada organisasi sektor publik Dinas Pertambangan dan Energi Aceh sesuai dengan Permendagri Nomor 21/2011 dinamakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. merupakan unsur pada Pemerintah Aceh. Dalam pencapaian kinerja selalu mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan setiap tahun.

Namun, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Aceh belum mencapai kinerja yang baik atau pencapaian kinerja/prestasi kerja setiap tahun belum begitu optimal. Hal ini dapat dilihat prestasi kerja yang tidak tercapai selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011 sebesar 17,32 %, tahun 2012 adalah 11,41 % dan tahun 2013 sebesar 14,44 %. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pencapaian kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Aceh diprediksi antara lain : partisipasi penyusunan anggaran yang belum maksimal., yaitu seluruh komponen organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Aceh belum berpartisipasi aktif dalam penyusunan anggaran. Faktor lain adalah kejelasan sasaran anggaran yang belum menggambarkan luasnya sasaran anggaran, belum spesifik dan tidak dipahami oleh semua Pihak dalam melaksanakannya. Fenomena menunjukkan bahwa bahwa usulan Rencana Kerja dan Anggaran RKA sering terlambat, dan sumberdaya manusia yang rendah, akibatnya pengesahan anggaran mengalami kelambatan yang mengakibatkan realisasi anggaran setiap tahun tidak tercapai (di bawah seratus persen).

Hal tersebut belum sesuai dengan maksud dan tujuan UU No.32 dan 33 Tahun 2004 dalam Mardiasmo (2005:06) serta bisnis hasil penelitiannya molehn Gul dkk (2001:14) dalam Ahmad, (2010:21, berkesimpulan bahwa partisipasi Penyusunan anggaran terhadap kinerja akan berpengaruh positif dalam organisasi sektor publik dan akan membawa konsekwensi semakin besar dalam mencapai prestasinya. Demikian juga pendapat Sofian (2008: 182) mengatakan bahwa komitmen organisasi sebaik apapun, tanpa disertai kejelasan sasaran dan kecukupan anggaran merupakan sesuatu yang sia-sia, untuk itu

kejelasan dan kesesuaian anggaran sebagai sumberdaya mutlak diperlukan untuk mencapai prestasi yang telah ditetapkan. .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Aceh. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Aceh.

LANDASAN TEORI

Pengertian Kinerja

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan kualitas anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri No.21/2011 pada pasal 1 ayat 37). Menurut Indra Bastian (2006:257) mengatakan kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika, sedangkan berdasarkan PP 58 tahun 2005 pasal 1 ayat 35 menyebutkan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan, dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Konsep Penganggaran Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri 13/2006 pasal 1 ayat 9). Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, di dalam APBD) tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu 1 tahun. Selain sebagai rencana keuangan pemerintah daerah, APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tujuan bernegara (Permendagri 13/2006 pasal 45 ayat 3).

Fungsi APBD berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 15 ayat 3 adalah a) Fungsi otorisasi, (b) fungsi perencanaan (c) fungsi pengawasan , (d) fungsi alokasi, (e) fungsi distribusi, (f) fungsi stabilisasi..Menurut PP No. 58/2005 pasal 16 ayat 3 menyebutkan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Partisipasi Penyusunan Anggaran di SKPD

Menurut Rudianto (2009:10) mengatakan bahwa partisipasi anggaran oleh manajemen sangat besar pengaruhnya. Tanpa partisipasi aktif akan besar godaan untuk mencapai tujuan anggaran atau berpengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya Rudianto,(2009:14) menjelaskan bahwa Informasi yang diperoleh manajemen dalam proses partisipasi penyusunan anggaran digunakan untuk dua tujuan. pertama informasi digunakan oleh bawahan untuk menghasilkan efisiensi dari seluruh alokasi sumber daya pada setiap operasi unit. Kedua informasi dalam partisipasi penyusunan anggaran dapat digunakan untuk merancang anggaran lebih efektif berdasarkan sistem insentif yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi pegawai.

Disamping itu, Mardiasmo (2002) dalam Ridwan (2012:13) menyebutkan bahwa dalam partisipasi anggaran pada sektor pemerintahan terdapat empat siklus anggaran yang meliputi:

Pertama, tahap persiapan anggaran. pada tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia. Terkait dengan adanya penaksiran maka perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran dengan cara melakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

Kedua tahap ratifikasi, tahap ratifikasi ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, dan coalition building yang memadai. Dalam hal ini integritas dan kesiapan mental (*coalition building*) sangat penting, karena pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.

Ketiga tahap implementasi/pelaksanaan anggaran, tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan pemerintah. Dalam hal ini manajer keuangan publik mempunyai sistem (informasi) akuntansi dan sistem

pengendalian manajemen. Manager keuangan publik bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati sebelumnya.

Keempat tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik maka diharapkan pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan banyak masalah.

PP No.58/2005 menyebutkan bahwa partisipasi SKPD dalam penyusunan anggaran adalah pada saat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Menurut Abdullah (2012:24), partisipasi dalam konteks pemerintahan daerah adalah keterlibatan SKPD dalam penyusunan anggaran daerah (APBD). Kepala SKPD (sekretariat, dinas, badan, kantor, inspektorat dan satuan polisi pamongparaja) merupakan pengguna anggaran/pengguna barang, yang diberi kesempatan untuk mengajukan usulan terkait dengan pelaksanaan Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD yang secara substansi harus sesuai dengan Tupoksi SKPD bersangkutan dan Sudah disetujui target kinerja dan pagu anggarannya dalam KUA dan PPAS. RKA-SKPD inilah yang disebut sebagai dokumen anggaran partisipatif di Pemda secara terkait penentuan alokasi anggaran dan target kinerja yang akan diakomodasi di dalam RAPBD dan akhirnya dalam perda APBD. Indra Bastian,(2006:191).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Sasaran anggaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian Sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. (Permendagri No.13/2006 pasal 1 ayat 43). Kusumaningrum (2010) Ahmad, (2012:133) berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kenis (2004 dalam Ahmad (2012:130 mengatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Pada kontek pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstrada) serta program dan kegiatan SKPD. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya, yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Selanjutnya Kenis menjelaskan bahwa kejelasan anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara kuat untuk meningkatkan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap pegawai terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efesiansi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan jika sasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Kenis juga menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya dan pendapatan pada pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, tetapi anggaran juga sebagai alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dan mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab (Munawar *et.al*, 2006, dalam Sumarno, 2006:12)). Direktorat jenderal Otonomi Daerah (2001) menyatakan, arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan (*goals*) dan sasaran (*objectives*) yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Kedua komponen arah dan kebijakan umum APBD ini merupakan jawaban atas “*where do we want to be*” dalam proses perencanaan strategis. Tujuan merupakan arah (*direction*) yang akan menunjukkan tujuan (*destination*) daerah dimasa yang akan datang, sedangkan sasaran menunjukkan batas-batas (*milestones*) sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Sasaran anggaran APBD tersebut harus disesuaikan dengan lima kriteria berikut :

1. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus dapat memberikan inspirasi kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan

terbaiknya.

2. Terukur. Sasaran harus dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
3. Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
4. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.
5. Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidaktepatan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti (Suhartono dan Mochammad, 2006).

Kerangka Pemikiran

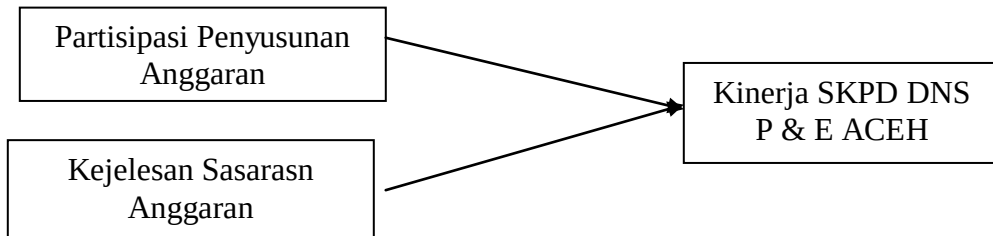
Hubungan Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja SKPD

Indriantoro (1993) dalam Ahmad (2012 :18) berpendapat bahwa partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Selanjutnya Soetrisno (2010) juga menjelaskan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Semakin aktif keterlibatan pengguna anggaran dalam penyusunan anggaran, maka kinerja akan semakin tinggi.

Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kinerja SKPD

Sasaran anggaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan (Permendagri No. 13/2006 pada pasal 1 ayat 37). Kenis (1979) berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- H_1 : Partisipasi Penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Aceh.
- H_2 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD I Pertambangan dan Energi Aceh.
- H_4 : Penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara simultan terhadap kinerja SKPD. Dinas Pertambangan dan Energi Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Aceh yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran yang berjumlah sebanyak 45 orang yang terdiri, dari : 1) Sekretariat 6 orang, Bidang Prograam dan Pelaporan 22 orang, Bidang Geologi dan sumber Daya manusia 4 orang, Bidang Pertambangan Mineral, Bstu Bara dan Pasan Bumi 4 orang, Bisang Minyak dan Panas Bumi, Listrik 4 orang dan UPT Laboratorium 5 orang. Karena populasi berjumlah 45 responden dan relatif kecil maka metode penelitian yang digunakan adalah metode sensus yaitu semua elemen populasi menjadi sample untuk diteliti (Sugiyono, 2008:84)

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- Penelitian lapangan (field reseach), merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan survey kuesioner dalam bentuk pernyataan-pernyataan secara terstruktur yang mana setup responder dibatasi dalam memberikan jawaban pada alternatif jawaban tertentu saja.

- b. Penelitian kepustakaan, merupakan data sekunder yang dikumpulkan berupa data-data teoritis yang mendukung penelitian ini, termasuk hasil riser terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.2

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Partisipasif penyusunan anggaran	Ppenyusunan anggaran adalah pd saat SKPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yang disusun berdasar kan prestasi kerja yang akan dicapai. PP No. 58/2005	Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran, Revisi anggaran, Pembuatan rencana dalam anggaran akhir, Kontribusi terhadap anggaran, Pendapat atau usulan pada saat anggaran (RKA)	Interval 1 - 5
Kejelasan sasaran anggaran	Sasaran anggaran .(target) adalah hasil yang diha rapkan dari suatu program/ keluaran yang diharap kan. (PermendagriNo.11/2011)	Kejelasan sasaran anggaran, Spesifikasi sasaran anggaran Kepentingan sasaran anggaran pada setiap program Outcome yang ingin dicapai, Skala prioritas Indikator kinerja (Permendagri No. 11/2011)	Interval 1 - 5
Kinerja SKPD	Keluaran atau hasil program dan kegiatan yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan	- Finansial, - Kepuasan - Proses - Waktu - Pelaporan (Indra Bastian,2006:277)	Interval 1 --5

kuantitas dan kualitas
yang terukur

Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian secara parsial.

a. Menentukan hipotesa nol (H_0) dan hipotesis alternatif ($1-1,$) sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = 0$; penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
- $H_a : \beta_1 \neq 0$; penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
- $H_0 : \beta_2 = 0$; sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.
- $H_a : \beta_2 \neq 0$; kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Pengujian secara simultan .

a. Menentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$; penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD
- H_a : paling sedikit ada satu β_i ($i = 1,2$) $\neq 0$, penyusunan anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakter sampel dalam penelitian serta memberikan deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu variabel yang partisipasi penyusunan anggaran (PA), Kejelasan Sasaran Anggaran (KSA) dan kinerja manajerial (KM). Hasil uji statistik deskriptif :

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KINERJA KSPD	3.8938	.54577	45
PRTSPS ANGG	3.8111	.38202	45
KJLSN ANGG	4.1111	.64745	45

Dari tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa rata-rata kejelasan sasaran anggaran 4.111 lebih tinggi dari rata variable partisipasi anggaran dan kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Enrgi Aceh.

Hasil I Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh suatu kuesioner. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan melihat signifikansi koefisien korelasi antara masing-masing indikator atau item pertanyaan terhadap total skor variabel (Ghozali, 2006). Nilai probabilitas dikatakan signifikan jika $p < 0,05$.

Dari penyajian validitas data diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi yang diperoleh variabel partisipasi anggaran, kejelasan anggaran dan kinerja SKPD berada diatas nilai kritis korelasi product moment (koefisien korelasi > 0.301), sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

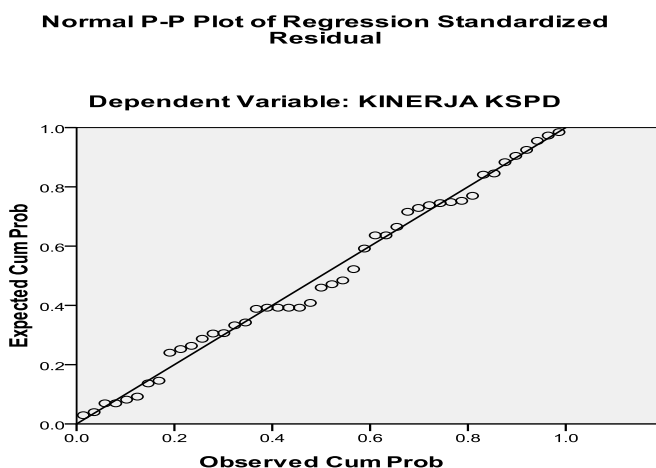
Hasil Uji Reabilitas

Uji reabilitas digunakan dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. masing-masing variabel $> 0,50$ (Ghozali, 2006). Berdasarkan reliability terlihat bahwa nilai koefisien *alpha cronbach* untuk masing-masing variable berada diatas adalah 0.50 (Malhotra, 2005 : 305). Oleh sebab itu kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini sangat baik dan layak untuk digunakan.

Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis grafik grafik normal *probability plot*, y Hasil uji gambar grafik normal *probability plot*.mtabel 4.1.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Tampilan grafik normal *probability plot* bahwa titik-titik (data) menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti atau mendekati arah garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolonieritas

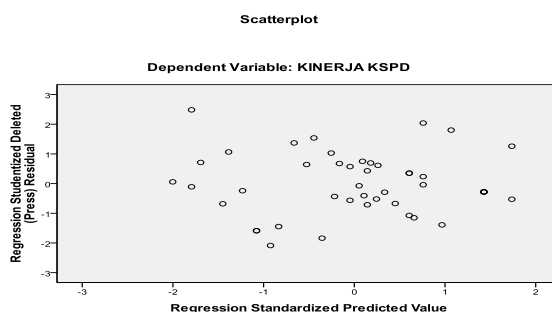
Pengujian multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Adanya multikolonieritas dapat diketahui jika nilai *tolerance* < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006)..

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini gambar grafik *scatterplot* yang menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas – Persamaan Regresi



Dari tampilan gambar 4.2 memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Regresi

Untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran terhadap kinerja SKPD baik secara bersama-sama maupun parsial digunakan regresi linear berganda, dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Science*) 17.0 for Windows Evolution Version, secara terinci dapat dilihat:

Tabel 4.5
Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.255	0.732		0.349	0.729
PRTSPS	0.677	0.178	0.474	3.809	0.000
ANGG					
KJLSN	0.257	0.105	0.305	2.451	0.018
ANGG					

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.255	0.732		0.349	0.729
PRTSPS ANGG	0.677	0.178	0.474	3.809	0.000
KJLSN ANGG	0.257	0.105	0.305	2.451	0.018

a. Dependent Variable: KINERJA KSPD

Sumber: Data diolah (2012)

Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 17.0 seperti terlihat pada Tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 0.255 + 0,677 X_1 + 0.257X_2$$

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Determinasi (R²)

Hasil Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6**Hasil Analisis Determinasi Perusahaan Manufaktur****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.612 ^a	0.374	0.345	0.44186	1.725

a. Predictors: (Constant), KJLSN ANGG, PRTSPS ANGG

b. Dependent Variable: KINERJA KSPD

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diinterpretasi sbb : peroleh nilai koefisien korelasi (R) : 0,612 dan R Square = 0.374. Menunjukkan bahwa kinerja SKPD dipengaruhi oleh

partisipasi dan kejelasan anggaran sebesar 37.4 % dan . sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Ini berarti model regresi layak digunakan.

Uji Serentak (bersama)

Untuk melihat apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajemen pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh digunakan uji F sbb :

Tabel 4.7
Pengujian Hipotesis secara Bersama (F)
ANOVA^b

		Sum of				
Model		Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.906	2	2.453	12.564	0.000 ^a
	Residual	8.200	42	0.195		
	Total	13.106	44			

a. Predictors: (Constant), KJLSN ANGG, PRTSPS ANGG

b. Dependent Variable: KINERJA KSPD

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} = 12.554 > F_{tabel} = 3,2145$. dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$). Hal ini menunjukkan variable independen tersebut secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja SKPD pada Dinas Pertambangan dan Energi Aceh .

Uji Secara Parsial.

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh masing-masing variabel partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan anggaran terhadap kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Aceh dilakukan uji secara parsial (uji t). Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4,8

Pengujian Hipotesis secara Parsial (t)**Coefficients^a**

		Unstandardized		Standardized			
		Coefficients		Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	
1	(Constant)	0.255	0.732		0.349	0.729	
	PRTSPS	0.677	0.178	0.474	3.809	0.000	
	ANGG						
	KJLSN	0.257	0.105	0.305	2.451	0.018	
	ANGG						

a. Dependent Variable: KINERJA KSPD

Berdasarkan table diatas, maka koefisien regresi secara parsial dapat dijelaskan bahwa variabel partisipasi penyusunan anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Aceh.

SIMPULAN DAN SARAN**Simpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap Kinerja Pada Dinas Pertambangan dan Energi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa besar-kecilnya terjadi partisipasi dan kejelasan anggaran yang dilakukan oleh penyusun/pembuat anggaran berpengaruh pada kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Aceh.
2. Secara bersama-sama menunjukkan adanya pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran terhadap kinerja SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Aceh..

Saran

1. Dinas Pertambangan dan Energi Aceh sebaiknya mengoptimalkan penerapan anggaran partisipatif karena hal ini berdampak pada kinerja SKPD dinas ybs.

2. Dinas Pertambangan Aceh disarankan untuk menentukan kejelasan sasaran anggaran setiap mata anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Aceh,
3. Dinas Pertambangan dan Energi Aceh sebaiknya memberikan tanggungjawab yang jelas setiap pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Hal ini sangat penting untuk mendorong partisipasi dalam penyusunan anggaran sehingga anggaran dapat disusun tepat waktu, tepat guna.

DAFTAR PERPUSTAKAAN

Abdullah, Syukri (2012, [Htp/syukri, wodpres/2012/1126/hubungan keuangan antara kepala daerah dan kepala skpd anggaran-skpd](http://syukri.wodpres/2012/1126/hubungan-keuangan-antara-kepala-daerah-dan-kepala-skpd-anggaran-skpd)).

Ahmad, (2012), Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi kasus pada Pemerintah Deli Serdang, Tesis USU tidak dipublikasikan.

Indra Bastian, (2006), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Kenis, L, (2004), Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Perfomance, *The Accounting Reveiew*, Vol LIV (4) :707.721.

Jaryanto, (2008), Pengaruh Desentralisasi terhadap Kinerja Mnajaerial dengan Sistem Akuntansi Mnajemen sebagai variable intervening ((studi pada Perusahaan manufaktur di Jawa Tengah), *focus Ekonomi Vol3 Non.2*.

Haykal,M, (2007), Analisa Peran dan Fungsi SKPD dalam Pengelolaan Kuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja (Studi Kasus pada Pemkab Aceh Timur), Tesis, Universitas Sumatera Utara.

Nordiawan, (2006), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Riyadi, S, (2002), Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai variable Moderating, dalam hubungan antara Partisipasi penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.

Ridwan Mattola, (2012), Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Locus Of Control sebagai Variabel Moderating, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Hasanuddin.

Republik Indonesia, (2011), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia, (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Republik Indonesia, (2006), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

.

Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah .

Republik Indonesia, (2004), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sekaran, Uma, (2006), Reserch Methods For Business, Edisi 4 buku I, terjemahan Yon, Kwan Jakarta : Salemba Empat.

Sofian, (2007), Faktor Permediasi pada Pengaruh Partisipasi Penganngaran terhadap Kinerja Pejabat Struktual Perguruan Tinggi, Fakultas Ekonomi Katholik Atma Jaya.

Sutrisno, (2010), Pengaruh Partisipasi, Motivasi dan Pelimpahan Wewenang Dakam

Penyusunan Anggrana dan Kinerja Mnajaerial, Tsesis, Tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro.

Sumarno, (2006), Pengaruh Sistem Pengndalian dan Penyusunan Anggaran Ter Kinerja, Tesis, Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponego Semarang.